

AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION (AHRC) DALAM MENGURANGI KASUS DISKRIMINASI RAS DI AUSTRALIA TAHUN 2015-2018

Micaella Dani

Social Media Specialist

micaelladani2@gmail.com

Muharjo

Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

muharjo.msi@gmail.com

Abstract

This journal discussing about the efforts of the Australian Human Rights Commission (AHRC) to reduce racial discrimination cases in Australia 2015-2018. The AHRC efforts was defined into five rules and procedures for resolving racial discrimination complaints. They are socialization or early warning, collecting complaints and investigation, fulfillment, continuation of legal actions, and public hearings. The Australia's moment ratified the rules of the United Nations of Human Rights Commissioner (UNHRC), namely the CERD rules concerning the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination which sparked the 1975 Racial Discrimination Act could construct the formation of the AHRC in 1986. The principle of UNHRC is an organization known as regime which adopted in Australia in the form of AHRC. This journal aims to discuss, describe and find out the efforts of the Australian Human Rights Commission in reducing cases of racial discrimination in Australia 2015-2018. Explain the rules and procedures for resolving racial discrimination complaints received by the AHRC through five stages of resolution. Afterwards analyze whether the five rules and procedures implemented by the AHRC implemented optimally to reduce racial discrimination cases which happened in Australia in 2015-2018.

Keywords: *AHRC, Race Discrimination and Australia*

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang upaya Komisi Hak Asasi Manusia Australia (AHRC) mengurangi kasus diskriminasi rasial di Australia 2015-2018. Upaya AHRC didefinisikan dalam lima aturan dan prosedur untuk menyelesaikan keluhan diskriminasi rasial. Diantaranya yaitu sosialisasi atau peringatan awal, pengaduan dan investigasi, pemenuhan, kelanjutan tindakan hukum, dan audiensi publik. Momen Australia meratifikasi aturan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), yaitu aturan CERD mengenai Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang memicu Undang-Undang Diskriminasi Rasial tahun 1975 yang dapat membentuk pembentukan AHRC di 1986. Pada prinsipnya UNHRC adalah organisasi yang dikenal sebagai rezim yang diadopsi di Australia dalam bentuk AHRC. Jurnal ini bertujuan untuk membahas, menggambarkan, dan mengetahui upaya Komisi Hak Asasi Manusia Australia dalam mengurangi kasus diskriminasi rasial di Australia 2015-2018. Menjelaskan aturan dan prosedur untuk menyelesaikan keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC melalui lima tahap resolusi. Setelah itu menganalisis apakah lima aturan dan prosedur yang diterapkan oleh AHRC dilaksanakan secara optimal untuk mengurangi kasus diskriminasi rasial yang terjadi di Australia pada 2015-2018.

Kata kunci: AHRC, Diskriminasi Ras dan Australia

Pendahuluan

Kasus diskriminasi ras di era modern ini masih banyak ditemui diberbagai negara. Perbedaan warna kulit, etnis, kepercayaan, budaya, dan latar belakang individu, kelompok maupun golongan kerap menjadi unsur utama pemantik diskriminasi. Diskriminasi ras merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menitikberatkan pada pelemahan psikologi individu, kelompok, atau golongan. Perbedaan yang muncul masih sulit diterima dengan baik oleh masyarakat. Pola pertahanan diri yang mereka lakukan melalui sikap nyata tanpa disadari telah memunculkan stigma buruk terhadap perbedaan tersebut. Kasus diskriminasi ras sering terjadi pada tatanan masyarakat dalam hal ini antar individu, kelompok, maupun individu dengan kelompok. (AHRC, *Racial Discrimination Know Your Rights*, Sydney, 2014, hal 2.) Australia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah terhadap diskriminasi ras. Banyaknya diaspora dari beberapa etnis yang masuk ke Australia membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis. Oleh karena itu kemudian pemerintah Australia meratifikasi aturan *United Nations of Human Rights Commissioner* (UNHRC), mengenai *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) pada tahun 1975 dan menerapkannya di Australia dengan membuat aturan *The Racial Discrimination Act* pada tahun 1975.

Setelah Pemerintah Australia meratifikasi CERD dan RDA tersebut, fenomena atau kasus diskriminasi ras masih saja ditemukan. Pemerintah Australia menerima keluhan-keluhan dari masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak seharusnya atau merasa dibedakan. Kasus diskriminasi ras ini banyak ditemukan ditempat-tempat publik seperti halte bus, sekolah, kantor atau tempat kerja, rumah makan dan tempat perbelanjaan maupun taman kota. Karena banyaknya kasus diskriminasi ras tersebut, pemerintah Australia kemudian membentuk suatu badan yang bernama *Australian Human Rights Commission* (AHRC) dengan landasan aturan *Australian Human Rights Commission Act* tahun 1986. Semenjak dibentuknya AHRC, kasus-kasus diskriminasi ras di Australia mengalami penurunan jumlah atau nominal. (Freedom from Discrimination: Report on the 40th anniversary of the Racial Discrimination ACT, National Consultation Report 2015”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/RDA40_report_2015_AHRC.pdf). AHRC menangani banyak kasus kemanusiaan antara lain diskriminasi ras, kesetaraan gender, imigran dan pencari suaka, diskriminasi seksual, penyandang disabilitas, orientasi identitas seksual, perlindungan anak, dan hak kebebasan. Berikut penjabaran alur mekanisme dari UNHRC hingga muncul Strategi Nasional Anti

Rasisme. Berdasarkan alur mekanisme di gambar 1 AHRC dalam hal ini memiliki sebuah Komisi Diskriminasi Ras yang bergerak di bawah *Race Discrimination Act* (RDA). Pemerintah Australia bersama dengan Komisi Diskriminasi AHRC membuat Strategi Nasional Anti Rasisme (*National Strategy Anti Racism*). Strategi Nasional Anti Rasisme di buat dengan komitmen penuh Pemerintah Australia bersama AHRC pada tahun 2011. Strategi ini disusun dengan mendengarkan beberapa masukan, konsultasi, serta kerjasama dari *Departemen Attorney-General's* , Kementerian Departemen Keluarga, Perumahan, Layanan Komunitas dan Urusan Masyarakat Adat, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kongres Nasional Penduduk Asli Australia, serta Dewan Federasi Komunitas Etnis Australia yang ditampung oleh AHRC Komisi Diskriminasi Ras. (AHRC, *National Anti Racism Strategy and Racism It Stops with Me - 2015*, Sydney, 2015, hal 13.) Berdasarkan alur mekanisme di gambar 1 AHRC dalam hal ini memiliki sebuah Komisi Diskriminasi Ras yang bergerak di bawah *Race Discrimination Act* (RDA). Pemerintah Australia bersama dengan Komisi Diskriminasi AHRC membuat Strategi Nasional Anti Rasisme (*National Strategy Anti Racism*). Strategi Nasional Anti Rasisme di buat dengan komitmen penuh Pemerintah Australia bersama AHRC pada tahun 2011. Strategi ini disusun dengan mendengarkan beberapa masukan, konsultasi, serta kerjasama dari *Departemen Attorney-General's* , Kementerian Departemen Keluarga, Perumahan, Layanan Komunitas dan Urusan Masyarakat Adat, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kongres Nasional Penduduk Asli Australia, serta Dewan Federasi Komunitas Etnis Australia yang ditampung oleh AHRC Komisi Diskriminasi Ras. (AHRC, *National Anti Racism Strategy and Racism It Stops with Me - 2015*, Sydney, 2015, hal 13.)

The image shows the logo for the United Nations Human Rights Council (UNHRC). It consists of the letters "UNHRC" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular box.

Gambar 1 : **Mekanisme Kebijakan Penanganan Kasus Diskriminasi Ras di Australia**
Sumber: Data diolah dari Australian Human Rights Commission oleh penulis.

Kajian Pustaka

Sedangkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Teoritis Rezim sebagai acuan. Ketertarikan pada rezim pada awalnya muncul dari ketidakpuasan dengan konsepsi yang dominan mengenai ketertiban, otoritas, serta organisasi. Hakikatnya rezim jika diamati dari sisi substantif merupakan pengaturan tentang norma, prinsip, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit. Rezim diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Secara umum, rezim merupakan segala perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional yang mengandung prinsip, norma, dan aturan di dalamnya. Interaksi yang ada di dalam negara, pemerintahan, maupun hubungan internasional membutuhkan sebuah tatanan untuk mengatur jalannya interaksi-interaksi tersebut sehingga dapat terkelola dengan baik. Rezim juga dapat dikatakan sebagai institusi sosial, dan seperti kebanyakan institusi sosial lainnya, atasan mereka mungkin tidak diartikulasikan secara formal atau diorganisir.

Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lain, terutama negara. Rezim mendapati aktor negara sebagai sumber yang mempengaruhi politik internasional. Rezim memiliki fokus pada ekspektasi aktor. Robert Keohane menambahkan hal tentang hubungan antara rezim internasional dengan institusi internasional, dalam editan buku *Regime Theory and International Relations*, dimana didalamnya lembaga internasional termasuk organisasi antar pemerintah atau transnasional formal, rezim internasional dan konvensi. Organisasi adalah entitas yang memiliki tujuan dengan struktur birokrasi dan kepemimpinan yang memungkinkan mereka untuk merespon suatu kejadian atau acara. Rezim adalah institusi dengan aturan eksplisit, disepakati oleh pemerintah yang berkaitan dengan serangkaian masalah atau isu tertentu dalam hubungan internasional. Robert Keohane juga menyampaikan konvensi adalah institusi informal dengan aturan dan pemahaman implisit yang membentuk harapan para aktor.

Stephen Krasner mengatakan bahwa rezim didefinisikan sebagai berikut: “Rezim adalah prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit dimana harapan para aktor dapat bertemu dalam area tertentu.” Australia meratifikasi aturan *United Nations of Human Rights Commissioner* (UNHRC) yaitu CERD mengenai *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* pada tahun 1975 yang kemudian membuat *Racial Discrimination Act 1975* di tahun yang sama sebagai bentuk implementasi dari Rezim Internasional dalam permasalahan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pemerintah Australia membentuk *Australian Human Rights*

Commission (AHRC) yang merupakan lembaga milik pemerintah bersifat nasional dan menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Australia, dalam hal ini AHRC sebagai organisasi yang memiliki prosedur tugas kerja sesuai aturan *Australian Human Rights Commission Act 1986*. Pada prinsipnya, UNHRC merupakan organisasi sekaligus rezim yang diadopsi di Australia dalam bentuk AHRC atau *Australian Human Rights Commission*. Aturan dan prosedur UNHRC dalam menyelesaikan atau mengurangi diskriminasi ras tidak jauh berbeda dengan aturan dan prosedur AHRC.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui metode ini, data diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan antarra fakta-fakta yang ada kemudian permasalahan yang ada dijelaskan dan dianalisa berdasarkan fakta-fakta dari website resmi milik Pemerintah Australia dan *Australian Human Rights Commission*, dan disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta yang ada.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terdiri buku-buku literatur serta memanfaatkan data-data melalui situs-situs internet dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan untuk penelitian. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menerangkan, menguji argumen pokok dari variable-variabel penelitian. Fokus penelitian ini adalah analisis hubungan-hubungan antara variabel.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Dinamika Diskriminasi Ras di Australia Tahun 2015-2018

Masyarakat Aborigin ialah penghuni pertama yang mendiami benua Australia jauh sebelum kedatangan bangsa kulit putih ke benua tersebut. Di samping itu, terdapat pula masyarakat Kepulauan Selat Torres yang tinggal di pulau-pulau antara benua Australia dan Papua Nugini. Masyarakat Aborigin sendiri hidup dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya dalam segi bahasa, terdapat sekitar 700 bahasa yang digunakan

sebagai alat komunikasi, baik masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres. Populasi Aborigin yang hidup di Australia ketika Inggris datang ke Australia pada tahun 1788 sekitar 300.000 jiwa. (Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians”, <http://www.peo.gov.au>)

Namun, semua berubah ketika bangsa kulit putih mendarat di wilayah mereka. Sebelum kedatangan Inggris ke Australia, Belanda telah lebih dahulu mendarat di Australia pada 1688, yakni oleh William Dampier. Dampier berpendapat bahwa masyarakat Aborigin merupakan masyarakat yang paling menyedihkan di dunia. Dampier banyak mengemukakan argumen mengenai warga Aborigin, salah satunya ialah bahwa Aborigin tidak memiliki perubahan dari barbarisme ke masa peradaban. Tiga pandangan Dampier dalam bukunya mengenai Australia, yaitu *“disgust with the aborigine; disgust with the land; dan the hope of better things somewhere in its very vastness.* (Pengakuan Indegenious People di Australia, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id>)

Tidak hanya masyarakat Aborigin yang mengalami diskriminasi, namun imigran dari luar Australia yang bukan berlatar belakang Eropa juga mengalami diskriminasi. Hal ini berawal dari diberlakukannya pembatasan imigran Tionghoa pada tahun 1901 melalui *Immigration Restriction Act 1901*. Kebijakan ini mengharuskan imigran non-Eropa melakukan test bahasa yang sulit dan diawasi langsung oleh pejabat imigrasi Australia. Pemerintah Australia pada masa itu lebih memilih imigran dari negara-negara Eropa, khususnya Britania Raya untuk mempertahankan standar ekonomi, masyarakat, dan kebudayaan Barat. Kebijakan ini kemudian dihapuskan secara bertahap pada tahun 1949 sampai 1973. (“From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia”, Belco Consulting, Perth, Australia, 2005, hal 21.)

Kasus diskriminasi ras di Australia berdasarkan pada rentang tahun 2015-2018 memiliki rekam jejak yang cukup beragam dan mengalami penurunan kasus pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik yang tersedia di *Australian Bureau of Statistics* (ABS) dan *Australian Human Rights Commission* (AHRC). Selama kurun waktu tersebut terdapat banyak keluhan yang masuk berisi keluhan kasus rasial atau diskriminasi ras yang terjadi di Australia. Berikut penjelasan pemaparannya:

1. Dinamika Diskriminasi Ras Tahun 2015-2016

Tabel 1

Persentase Keluhan Kasus Diskriminasi di Australia Tahun 2015-2016

No.	Jenis Diskriminasi	Persentase
-----	--------------------	------------

1.	Diskriminasi Disabilitas	37%
2.	Diskriminasi Rasial	21%
3.	Diskriminasi Seksual	20%
4.	Diskriminasi Hak Asasi Manusia	14%
5.	Diskriminasi Usia	8%
Total		100%

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, "2015-2016 Complaint Statistics", <https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%202015%20-%202016%20Complaint%20Statistics.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan tabel 1 menjelaskan tentang jumlah persentase keluhan kasus yang masuk berdasarkan jenis diskriminasi yang dikeluhkan. Dari total 2.013 keluhan, 37% keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas. Lalu diurutan kedua, sebanyak 21% keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Rasial. Selanjutnya 20% keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Seksual, 14% keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Komisi Hak Asasi Manusia dan 8% keluhan diajukan berdasarkan Undang-Undang Diskriminasi Usia. Dapat diartikan bahwa pada rentang tahun 2015-2016 terdapat keluhan sebanyak 422, yakni 21% dari 2.013 keluhan yang masuk.

Terdapat berbagai macam alasan munculnya keluhan yang diterima oleh AHRC sepanjang tahun 2015-2016. Dari total 743 keluhan yang diterima AHRC, ras menjadi alasan terjadinya diskriminasi rasial dengan jumlah keluhan tertinggi yang diterima sebanyak 401 keluhan atau dengan total persentase 54% dari keseluruhan keluhan. Tentu hal ini cukup menjadi perhatian karena angka tersebut terbilang cukup besar dan harus mendapatkan perhatian serius oleh AHRC agar di tahun selanjutnya terjadi penurunan angka keluhan yang diterima terkait diskriminasi rasial. AHRC dalam hal ini harus menyadari bahwa memang masih banyak masyarakat Australia yang melaporkan keluhan adanya kasus diskriminasi ras yang terjadi di sekitarnya.

2. Dinamika Diskriminasi Ras Tahun 2016-2017

Tabel 2
Persentase Keluhan Kasus Diskriminasi di Australia Tahun 2016-2017

No	Jenis Diskriminasi	Persentase
1.	Diskriminasi Disabilitas	39%
2.	Diskriminasi Rasial	21%
3.	Diskriminasi Seksual	24%
4.	Diskriminasi Hak Asasi Manusia	8%

5.	Diskriminasi Usia	8%
Total		100%

Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC), “2016-2017 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202016-2017.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.

Dilihat dari data yang telah dipaparkan pada tabel 2, sebanyak (39%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas, lalu sebanyak (24%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Seksual. Sebanyak (21%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Rasial, (8%) keluhan diajukan dibawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Australia dan (8%) lainnya keluhan diajukan berdasarkan Undang-Undang Diskriminasi Usia. Dapat dilihat bahwa pada rentang tahun 2016-2017 keluhan tentang Diskriminasi Rasial berjumlah 407, yakni 21% dari 1.939 keluhan yang masuk.

Terdapat berbagai macam alasan munculnya keluhan yang diterima oleh AHRC sepanjang tahun 2016-2017. Dari total 784 keluhan yang diterima AHRC, ras masih menjadi alasan tertinggi terjadinya diskriminasi rasial dengan jumlah keluhan yang diterima yakni sebanyak 329 keluhan atau dengan persentase 42% dari keseluruhan keluhan. Pada tahun 2016-2017, terdapat penurunan dengan jumlah yang signifikan dari tahun sebelumnya dalam hal alasan keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC pada lingkup Ras. Terdapat 401 keluhan pada tahun 2015-2016 yang kemudian turun menjadi 329 keluhan pada tahun 2016-2017.

3. Dinamika Diskriminasi Ras Tahun 2017-2018

Tabel 3
Persentase Keluhan Kasus Diskriminasi di Australia Tahun 2017-2018

No	Jenis Diskriminasi	Persentase
1.	Diskriminasi Disabilitas	42%
2.	Diskriminasi Rasial	14%
3.	Diskriminasi Seksual	27%
4.	Diskriminasi Hak Asasi Manusia	9%
5.	Diskriminasi Usia	8%
Total		100%

Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC), “2017-2018 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables_2017-18.pdf, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, hal 01.

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dilihat bahwa sebanyak (42%) keluhan diajukan oleh masyarakat di bawah Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas. Selanjutnya sebanyak

(14%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Rasial, (27%) keluhan diajukan di bawah UU Diskriminasi Seksual, (8%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Usia dan (9%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kembali terjadi penurunan jumlah keluhan yang masuk kepada AHRC terkait kasus diskriminasi rasial. Total 373 keluhan diskriminasi rasial diterima oleh AHRC atau 14% dari 2.668 total keluhan yang masuk.

Terdapat berbagai macam alasan munculnya keluhan yang diterima oleh AHRC sepanjang tahun 2017-2018, sama dengan data pada dua tahun sebelumnya. Perbedaan yang dapat diamati pertama kali adalah jumlah total keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC, total terdapat 616 keluhan yang diterima AHRC. Hal ini berarti telah terjadi penurunan dari dua tahun sebelumnya, yakni dari 743 keluhan pada tahun 2015-2016 dan 784 keluhan pada tahun 2016-2017.

Profil *Australian Human Rights Commission* (AHRC)

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai kiprah dan kinerja AHRC pada tahun 2015-2018, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai profil dari AHRC. Sub bab ini akan menjelaskan seputar profil AHRC mulai dari sejarah berdirinya, struktur organisasi, aturan dan prosedur atau mekanisme kerja lembaga. *The Australian Human Rights Commission* yang sebelumnya dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia dan *Equal Opportunity* didirikan pada tanggal 10 Desember 1986. Tanggal 10 Desember kini dijadikan sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. (History of the Commission, <https://www.humanrights.gov.au/about/what-are-human-rights/history-commission>) AHRC memiliki peran sebagai pengawas penegakan Hak Asasi Manusia di Australia. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap berlakunya Hak Asasi Manusia di Australia. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin berlakunya peraturan dan ketetapan mengenai Hak Asasi Manusia, sehingga hak-hak tersebut akan terus dihormati dan dihargai serta dijunjung tinggi keberadaannya di Australia.

Dalam struktur AHRC dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh tujuh Komisaris. Pada tahun kepengurusan 2017-2018, Profesor Emeritus Rosalind Croucher menjabat sebagai Presiden AHRC. Mekanisme kerja lembaga diawasi langsung oleh presiden AHRC sendiri. Presiden memiliki wewenang untuk melakukan instruksi dan melakukan pengawasan terhadap Direktur Eksekutif yang juga mengepalai Direktur Kebijakan dan Program serta Direktur Investigasi dan Pelayanan Konsultasi. Selain bertanggung jawab

kepada Presiden AHRC dan melakukan koordinasi kepada dua kepala direktur dibawahnya, Direktur Eksekutif juga secara langsung memiliki tanggung jawab dalam bidang komunikasi, pelayanan perusahaan dan hukum.

AHRC memiliki tujuan yang harus diwujudkan melalui langkah inovatif dan cepat. AHRC berupaya memastikan komunitas-komunitas atau organisasi yang ada di Australia mendapat manfaat maksimal dari tindakan yang perlu dilakukan oleh Komisi. Kerangka kerja AHRC memiliki visi “Hak Asasi Manusia untuk siapa pun, di mana pun dan kapan pun”. Tujuan utama dari AHRC adalah untuk memenuhi fungsi hukum lembaga nasional sehingga warga Australia memiliki akses ke dalam penanganan pengaduan keluhan dan proses penyelidikan publik yang efektif mengenai masalah-masalah Hak Asasi Manusia dan diskriminasi, serta mendapat manfaat dari pendidikan Hak Asasi Manusia, advokasi, pemantauan dan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh AHRC.

Komisi Hak Asasi Manusia Australia atau AHRC juga melakukan investigasi dan menyelesaikan keluhan tentang diskriminasi seksual, ras, disabilitas dan diskriminasi usia yang melanggar hukum. Diskriminasi seksual meliputi kasus pelecehan seksual dan diskriminasi berdasarkan kehamilan, status perkawinan atau hubungan, menyusui, tanggung jawab keluarga, *gender identity*, status interseks dan orientasi seksual. Selanjutnya, diskriminasi disabilitas termasuk diskriminasi berdasarkan cacat fisik, intelektual, sensorik, pembelajaran, dan penyakit kejiwaan. Termasuk juga kondisi medis seperti cedera terkait pekerjaan, cacat masa lalu, sekarang dan masa depan maupun pergaulan dengan penyandang cacat. Sedangkan diskriminasi ras dalam hal ini meliputi kasus kebencian rasial dan diskriminasi berdasarkan warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnis dan status imigran. Terakhir diskriminasi usia mencakup diskriminasi berdasarkan usia yang terlalu muda atau terlalu tua. (Complaint Information Service, <https://www.humanrights.gov.au/our-work/complaint-information-service/australian-human-rights-commissions-complaint-process>.)

Oleh karena itu, secara lembaga AHRC bertanggung jawab langsung dalam penanganan kasus diskriminasi ras di Australia kepada masyarakat dan pemerintah Australia. Selain itu secara sifat kelembagaan, AHRC yang mengadopsi sistem UNHRC dalam tubuh kelembagaannya memiliki tanggung jawab secara moral kepada badan internasional tersebut atas upayanya dalam menegakkan HAM di Australia. AHRC yang memiliki fungsi hanya sebatas lembaga penanggulangan maraknya kasus diskriminasi rasial, juga tetap

melaksanakan peran lanjutannya dalam membawa keluhan diskriminasi rasial yang tidak dapat terselesaikan secara proses konsiliasi kepada lembaga pengadilan.

Kiprah *Australian Human Rights Commission* (AHRC) Tahun 2015-2018

Kiprah AHRC tentu tidak lepas dari beberapa faktor, mulai dari faktor historis, pemerintahan, hingga dialektika yang terjadi pada masyarakat Australia dan pemerintah Australia. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Hal tersebut didasarkan pada nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya yang mencerminkan pada Inggris dan Amerika Utara. Hak asasi manusia di Australia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dengan sejarah awal mula masuknya Hak Asasi Manusia di Australia

Kiprah AHRC sendiri sejak didirikan pada tahun 1986 memiliki pola perkembangan *up and down*. Akan tetapi setelah dihapusnya kebijakan *Australian White Policy* dan adanya Strategi Nasional Australia terkait persamaan ras, AHRC mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015-2016 misalnya tercatat 84% kasus diskriminasi ras di Australia yang mampu diselesaikan oleh *Australian Human Rights Commission* (AHRC) dalam kurun waktu satu tahun. Ada yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa pada 2015-2016, sekitar 3% dari keluhan yang diselesaikan terkait kasus diskriminasi yang melanggar hukum dilanjutkan ke pengadilan. Pada tahun tersebut, kurang dari setengah keluhan yang masuk diselesaikan dalam waktu 3 bulan dengan total persentase 47%, lalu sebanyak 82% diselesaikan dalam waktu 6 bulan, 94% selanjutnya dalam waktu 9 bulan dan 98% dalam 12 bulan. Rata-rata jangka waktu penyelesaian pengaduan keluhan yang dibutuhkan dari saat penerimaan hingga penyelesaian keluhan adalah sekitar 3,8 bulan.

Kiprah AHRC pada tahun selanjutnya yakni rentang tahun 2016-2017 juga memiliki hasil perkembangan yang cukup signifikan. AHRC pada tahun tersebut menyelesaikan keluhan yang masuk sejumlah 1.987. AHRC dalam hal ini melakukan 1.128 proses konsiliasi yang mana sebanyak 843 keluhan atau 75% diantaranya berhasil diselesaikan. Hasil pencapaian penyelesaian ini merupakan penyelesaian masalah yang berhasil bagi lebih dari 1.686 orang dan organisasi yang terlibat dalam keluhan yang dihadapi oleh AHRC. Hal ini merupakan tingkat keberhasilan konsiliasi tertinggi kedua dalam catatan AHRC. (2016-2017 Complaint Statistics,

https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202016-2017.pdf.)

Selanjutnya kiprah AHRC pada rentang tahun 2017-2018 memiliki hasil penyelesaian kasus diskriminasi yang serupa dengan dua tahun sebelumnya. AHRC menyelesaikan total 2.111 keluhan selama tahun 2017-2018. Komisi menyelesaikan 1.262 proses konsiliasi yang mana 931 keluhan atau 74% diantaranya berhasil diselesaikan. Hal ini merupakan penyelesaian kasus yang berhasil dilakukan untuk lebih dari 1.862 orang dan organisasi yang terlibat dalam keluhan yang dihadapi oleh AHRC. Informasi yang didapat terkait hasil dari keluhan di bawah Undang-Undang Anti Diskriminasi menunjukkan bahwa 31% dari hasil penyelesaian kasus tersebut memiliki manfaat bagi orang-orang di luar pengadu individu. Data survei AHRC pada tahun ini juga memiliki fokus pada efek edukatif dari proses penyelesaian keluhan yang dilakukan oleh AHRC. Contohnya adalah dalam kaitan dengan keluhan yang masuk, sekitar 77% dari peserta yang di survei oleh AHRC menunjukkan bahwa keterlibatan dalam proses penyelesaian keluhan telah membantu mereka untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Anti Diskriminasi.

Fakta ini memiliki corak yang sama dengan apa yang terjadi pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2016-2017. Data yang dipaparkan oleh AHRC menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2018, kurang dari 3% dari total keluhan yang masuk telah dilanjutkan ke pengadilan. Ini dikarenakan sebanyak 3% keluhan tersebut merupakan keluhan diskriminasi yang melanggar hukum. Hasil kinerja AHRC dalam menangani dan mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia pada tahun 2015-2018 juga membuahkan hasil yang cukup positif dilihat dari Keluhan Diskriminasi Rasial Yang Diterima Oleh AHRC Berdasarkan Alasan. Dapat dilihat bahwa data statistik laporan tahunan AHRC terkait alasan terjadinya diskriminasi rasial pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan grafik yang positif. Hal ini dapat ditemukan pada jumlah total keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC tiap tahunnya yang terus mengalami penurunan. Sebanyak 743 keluhan pada tahun 2015-2016, lalu naik sedikit dengan total 784 keluhan pada tahun 2016-2017 dan kembali turun dengan total 616 keluhan pada tahun 2017-2018.

Upaya Mengurangi Kasus Diskriminasi Ras Di Australia Oleh (AHRC) Tahun 2015-2018

Pada tahun 1975 Australia meratifikasi aturan *United Nations of Human Rights Commissioner* (UNHRC) yaitu aturan mengenai *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) yang kemudian mencetuskan *Racial Discrimination Act 1975* di tahun yang sama sebagai bentuk implementasi dan kepatuhan dari Rezim Internasional dalam permasalahan Hak Asasi Manusia. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=9&Lang=EN.

Selanjutnya pemerintah Australia membentuk *Australian Human Rights Commission* (AHRC) yang merupakan lembaga nasional pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Australia, dalam hal ini AHRC sebagai organisasi yang memiliki prosedur tugas kerja sesuai aturan *Australian Human Rights Commission Act 1986*.

Pada prinsipnya UNHRC merupakan organisasi sekaligus rezim yang dasar pelaksanaannya diadopsi di Australia dalam bentuk AHRC. Aturan dan prosedur UNHRC dalam upaya menyelesaikan atau mengurangi diskriminasi ras tidak jauh berbeda dengan aturan dan prosedur AHRC. Aturan dan prosedur AHRC yang memiliki keterkaitan dengan aturan dan prosedur UNHRC antara lain adalah sosialisasi atau peringatan awal, penampungan atau akomodasi, penyelidikan atau investigasi, penyelesaian atau konsiliasi dan penerusan tindakan hukum serta mekanisme terakhir adalah audiensi publik. (AHRC Making Complaint, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/languages/IND_AHRC_Making_a_complaint.pdf.)

Melalui aturan dan prosedur ini, tahap penyelesaian kasus diskriminasi ras yang dilakukan oleh AHRC hanya sampai pada batas tahap konsiliasi atau audiensi publik. Hal ini berlandaskan pada tugas Komisi AHRC yang bukan untuk melakukan proses penyelesaian di pengadilan. Penjelasan ini tertuang dalam pasal 10 A paragraf kedua. Pada aturan dasar tugas dan fungsi AHRC tersebut dipaparkan bahwa AHRC berfungsi untuk menyelidiki pengaduan dan menyelesaikannya dengan cara konsiliasi. Bukan sebagai pengadil kasus diskriminasi yang selama ini terjadi di Australia.

Aturan dan prosedur AHRC dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia tersebut merupakan upaya pasti dan sah di hadapan hukum. Lima tahapan upaya penanganan dan penyelesaian tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia pada kurun waktu 2015-2018 yang telah diterima keluhannya oleh AHRC. Pada tahun 2015-2018 AHRC telah menerima total keluhan diskriminasi sebanyak 2.046 keluhan pada tahun 2015-2016, 1.939 keluhan pada tahun 2016-2017 dan 2.013 keluhan pada tahun 2017-2018. Dari total keseluruhan keluhan diskriminasi yang diterima oleh AHRC, pada

tahun 2015-2016 sebanyak 21% diantaranya adalah keluhan terkait diskriminasi rasial. Pada tahun tersebut, AHRC menerima sebanyak 429 keluhan diskriminasi rasial dan berhasil menyelesaikan sebanyak 396 keluhan diantaranya. Lalu pada tahun berikutnya yakni 2016-2017, sebanyak 21% dari total keseluruhan keluhan yang masuk merupakan keluhan diskriminasi rasial. (2017-2018ComplaintStatistics,https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables_2017-18.pdf.)

Jika dilihat dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa grafik keluhan diskriminasi rasial yang telah diterima dan diselesaikan oleh AHRC dari tahun 2015-2018 mengalami jumlah penurunan keluhan yang diterima dan peningkatan keluhan yang dapat diselesaikan. Upaya yang dilakukan oleh AHRC dalam mengurangi jumlah diskriminasi ras di Australia pada tahun 2015-2018 tersebut tentu tidak terlepas dari tahapan atau upaya penyelesaian yang dimiliki oleh AHRC. Terkait sejauh mana peran dari masing-masing upaya tersebut dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia, berikut akan dipaparkan mengenai upaya AHRC melalui aturan dan prosedur penyelesaian kasus diskriminasi ras oleh AHRC.

Upaya Sosialisasi atau Peringatan Awal Pada Masyarakat Oleh AHRC

Upaya penyelesaian kasus diskriminasi ras yang pertama adalah melalui mekanisme sosialisasi atau peringatan awal oleh AHRC. Pemerintah Australia bersama dengan Kepala Komisi Diskriminasi Ras AHRC berusaha untuk mencari langkah nyata dalam aktualisasi mekanisme CERD UNHRC. Pemerintah Australia dan Kepala Komisi Diskriminasi Ras AHRC menyusun strategi tersebut dengan melibatkan Departemen *Attorney/General's*, Kementerian Departemen Keluarga, Perumahan, Layanan Komunitas, dan Urusan Masyarakat Adat, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kongres Nasional Penduduk Asli Australia, serta Dewan Federasi Komunitas Etnis Australia. Pemerintah Australia dan AHRC mendengarkan masukan konsultasi serta saran dari pihak-pihak tersebut di atas untuk mendapatkan evaluasi serta solusi guna menentukan langkah aktualisasi mekanisme yang sudah AHRC terapkan. Strategi Nasional Anti Rasisme ini memiliki fokus pada aktualisasi *Early Warning* atau peringatan awal saja. AHRC memilih sasaran pada bidang media layanan pemerintah, edukasi atau pendidikan dan lingkup masyarakat. (National Anti-Racism Strategy,<https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/National%20Anti-Racism%20Strategy.pdf>.)

Pada upaya pertama ini, AHRC bertindak lebih kepada langkah pencegahan melalui sosialisasi dan peringatan awal kepada setiap masyarakat Australia. Salah satu platform yang digunakan oleh AHRC adalah melalui website resminya pada (www.humanrights.gov.au). Melalui website tersebut, AHRC memberikan dan menampilkan konten-konten serta artikel edukasi terkait pencegahan dan pengurangan rasisme di Australia. Selain melalui website resmi, AHRC juga memberikan sosialisasi terkait rasisme melalui platform media sosial yang dimilikinya yakni Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Semua akun media sosial tersebut tentunya terintegrasi dengan website resmi yang dimiliki oleh AHRC, berikut ini tampilan dari website AHRC:



Gambar 2
Layanan Website Resmi AHRC Terkait Diskriminasi Rasial
Di Australia

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC), "Race Discrimination"*,
<https://www.humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Website resmi AHRC memiliki beragam fitur yang disediakan oleh AHRC dalam mensosialisasikan pengurangan masalah diskriminasi rasial. Mulai dari kolom berita seputar kegiatan AHRC dalam pengurangan diskriminasi rasial berbentuk artikel dan video, publikasi kegiatan kemanusiaan, agenda AHRC dengan masyarakat publik dan peringatan awal AHRC melalui pendidikan. Selain itu, AHRC berperan aktif dalam membuat kegiatan atau proyek positif terkait sosialisasi pencegahan terjadinya kasus diskriminasi ras melalui proyek sosial dan kegiatan lainnya.

Selain melalui website, bidang pendidikan AHRC juga memberikan sosialisasi terkait diskriminasi ras dalam platform sosial media mereka. Melalui Fb, Instagram, Twitter maupun YouTube AHRC mempublikasikan banyak video dan artikel yang berisikan tentang ajakan atau himbauan untuk menghentikan budaya rasisme. Salah satu bentuk contoh proyeknya

adalah *Racism, It Stops With Me*, *Colours of Australia* dan Program *Human Right Awards*. Kampanye rasisme ini bertujuan untuk mempromosikan pengertian di dalam komunitas Australia tentang apa itu rasisme dan bagaimana cara mencegahnya serta melawannya. Strategi melalui kampanye *Racism It Stops With Me* memiliki fokus pada kesadaran publik, keterlibatan pemuda, dan dunia pendidikan serta olahraga yang berbasis kemitraan. Kemitraan ini terjalin bersama 364 organisasi yang tergabung dalam Komunitas Australia. Kampanye ini berupa video-video yang diambil dari pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang pernah mengalami diskriminasi ras di Australia.

Upaya Akomodasi dan Investigasi Atas Keluhan Masyarakat Oleh AHRC

Upaya berikutnya dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia adalah melalui upaya penampungan atau akomodasi. Pada tahap ini Konsiliator menampung keluhan dari masyarakat atau korban rasisme yang masuk melalui Hotline Informasi Nasional Komisi ataupun melalui daring online situs AHRC. Kemudian ketika penyelidikan berlangsung, Konsiliator menyelidiki pengaduan dari korban yang telah masuk dan melakukan peringatan kepada pelaku. Konsiliator akan menghubungi kedua belah pihak baik pelapor atau korban dan terlapor atau pelaku melalui daring online, telepon, atau tatap muka secara langsung. Aturan dan prosedur ini juga mengadopsi aturan dan prosedur UNHRC nomor dua dan tiga yaitu memeriksa keluhan atau pengaduan.

Terdapat syarat dan prosedur pengajuan keluhan pada tahap ini diantaranya adalah keluhan atau pertanyaan yang diajukan harus tertulis. Warga Australia dapat mengisi formulir keluhan dan mengirim kembali melalui surat atau faks kepada AHRC atau dapat mengajukan keluhan secara daring (*online*) di situs *website* AHRC melalui www.humanrights.gov.au. Selanjutnya, warga Australia yang mengajukan pertanyaan dan keluhan dapat mengajukan keluhan dalam bahasa pilihannya dan AHRC juga dapat membantu menuliskan keluhan tersebut jika diperlukan. Warga Australia tidak membutuhkan pengacara untuk mengajukan keluhan. Jika nantinya AHRC tidak bisa menangani keluhan yang diajukan maka AHRC akan menjelaskan alasannya.

Pemaparan berikutnya adalah tentang berapa banyak pertanyaan yang diajukan oleh penduduk Australia terkait kasus diskriminasi. Berdasarkan data laporan tahunan yang dipaparkan oleh AHRC, pada tahun 2015-2016 Komisi menerima sebanyak 16.836 pertanyaan. Dari total pertanyaan yang diterima oleh AHRC pada tahun 2015-2016 tersebut akan diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4
Presentase Masalah Utama Diskriminasi Yang Diangkat Oleh Penanya Tahun 2015-2016

No	Jenis Pertanyaan Yang Masuk	Presentase
1.	Diskriminasi Disabilitas	37%
2.	Diskriminasi Rasial	21%
3.	Diskriminasi Seksual	20%
4.	Diskriminasi Pelecehan dan Penindasan	14%
5.	Diskriminasi HAM dan Imigrasi	8%
Total		100%

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, "2015-2016 Complaint Statistics", <https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%202015%20-%202016%20Complaint%20Statistics.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.

Berdasarkan tabel 4, mayoritas pertanyaan yang diterima oleh AHRC melalui Hotline Informasi Nasional Komisi sebanyak 63% dari keseluruhan pertanyaan. Sedangkan masalah utama yang diangkat oleh para penanya pada tahun 2015-2016 diantaranya adalah diskriminasi disabilitas sebanyak 37%, masalah ketenagakerjaan umum termasuk pelecehan dan penindasan sebanyak 21%, diskriminasi seksual atau *Sex Discrimination Act* sebanyak 20%, diskriminasi rasial termasuk kebencian rasial sebanyak 14% dan isu-isu terkait hak asasi manusia termasuk imigrasi dan penahanan imigrasi sebanyak 8%. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pertanyaan terbanyak yang diterima oleh AHRC pada tahun 2015-2016 ada dua hal yakni diskriminasi disabilitas dan diskriminasi rasial.

Jumlah pertanyaan terkait diskriminasi rasial di tahun 2015-2016 yakni sebanyak 21% dari 16.836 pertanyaan. Hal ini berarti terdapat 3.535 pertanyaan yang masuk seputar diskriminasi rasial. Angka ini tentu masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pertanyaan lain yang diterima oleh AHRC. Selanjutnya, masih dari data statistik laporan tahunan milik AHRC, pada tahun 2016-2017 Komisi menerima sebanyak 14.911 pertanyaan. Dari total pertanyaan yang diterima oleh AHRC pada tahun 2016-2017, berikut ini pengklasifikasian pertanyaan kasus diskriminasi yang masuk:

Tabel 5
Presentase Masalah Utama Diskriminasi Yang Diangkat Oleh Penanya Tahun 2016-2017

No	Jenis Pertanyaan Yang Masuk	Presentase
1.	Diskriminasi Disabilitas	39%
2.	Diskriminasi Rasial	21%
3.	Diskriminasi Seksual	24%

4.	Diskriminasi Pelecehan dan Penindasan	8%
5.	Diskriminasi HAM dan Imigrasi	8%
Total		100%

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, “2016-2017 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202016-2017.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.

Berdasarkan data pada tabel 5, mayoritas pertanyaan yang diterima oleh AHRC adalah melalui Hotline Informasi Nasional Komisi yakni sebanyak 53%. Sedangkan masalah utama yang diangkat oleh para penanya pada tahun 2016-2017 diantaranya terkait dengan diskriminasi disabilitas sebanyak 39%, masalah ketenagakerjaan umum termasuk pelecehan dan penindasan sebanyak 8%, diskriminasi seksual atau *Sex Discrimination Act* sebanyak 24%, diskriminasi rasial termasuk kebencian rasial sebanyak 21% dan isu-isu terkait hak asasi manusia termasuk imigrasi dan penahanan imigrasi sebanyak 8%. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pertanyaan terbanyak yang masuk diterima oleh AHRC pada tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yakni diskriminasi disabilitas dan rasial. Jumlah pertanyaan diskriminasi rasial yang diterima pada tahun 2016-2017 adalah sebanyak 3.131 atau 21% dari 14.911 pertanyaan. Terjadi penurunan jumlah pertanyaan seputar diskriminasi rasial pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2015-2016 yakni sebanyak 3.535 pertanyaan.

Pada rentang tahun selanjutnya yakni tahun 2017-2018, AHRC menerima pertanyaan sebanyak 14.164. Mayoritas pertanyaan yang masuk dan diterima juga masih melalui Hotline Informasi Nasional AHRC sebanyak 55%. Berikut ini akan dipaparkan presentase masalah utama diskriminasi yang diangkat oleh para penanya dalam rentang tahun tersebut:

Tabel 6
Presentase Masalah Utama Diskriminasi Yang Diangkat Oleh Penanya Tahun 2017-2018

No	Jenis Diskriminasi	Presentase
1.	Diskriminasi Disabilitas	42%
2.	Diskriminasi Rasial	14%
3.	Diskriminasi Seksual	27%
4.	Diskriminasi Hak Asasi Manusia	8%
5.	Diskriminasi Usia	8%
Total		100%

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, “2017-2018 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202017-2018.pdf, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, hal 01.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada tabel 6, dalam rentang tahun 2017-2018 sebanyak 42% pertanyaan diajukan dalam lingkup diskriminasi disabilitas. Sebanyak 14% pertanyaan diajukan dalam lingkup diskriminasi rasial termasuk kebencian rasial. Berikutnya pertanyaan atas kasus diskriminasi seksual sebesar 27%, pertanyaan dalam lingkup Hak Asasi Manusia sebesar 8%. Selanjutnya pertanyaan masalah diskriminasi usia tercatat diajukan sebesar 8%. Dari pemaparan di atas, dalam lingkup diskriminasi rasial terdapat 1.983 jumlah pertanyaan yang diajukan atau 14% dari total 14.164 pertanyaan. Hal ini menandakan bahwa terdapat penurunan pertanyaan seputar diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC dari tahun-tahun sebelumnya.

Setelah melakukan penampungan keluhan oleh para pelapor, AHRC selanjutnya akan masuk ke dalam tahap upaya penyelidikan. Melalui upaya ini AHRC akan menghubungi pelapor untuk membicarakan keluhan yang telah diajukan dan AHRC akan meminta pelapor untuk memberikan informasi lebih lanjut. Secara umum komisi akan menghubungi orang atau organisasi yang telah diajukan sebagai keluhan, lalu memberi mereka salinan keluhan pengadu dan meminta komentar mereka dan informasi terkait lainnya. AHRC akan memberi informasi lanjutan kepada pengadu terkait hasil dari apa yang mereka katakan sebagai tanggapan atas keluhan yang diajukan.

AHRC kemudian akan menghubungi orang-orang yang telah pengadu tuduh meragukan tentang keluhan yang diajukan dan memberi mereka bagian-bagian pengaduan yang berkaitan dengan mereka. Pada beberapa kasus, AHRC memutuskan untuk tidak melanjutkan menangani keluhan yang telah diajukan. Jika ini terjadi, AHRC akan menjelaskan alasannya kenapa keluhan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan penanganannya. AHRC memiliki wewenang untuk berbicara dengan pengadu dan mencoba menyelesaikan keluhan mereka melalui konsiliasi.

Upaya Penyelesaian atau Konsiliasi oleh AHRC

Selanjutnya upaya ketiga dalam aturan dan prosedur AHRC terkait penanganan dan pengurangan persoalan diskriminasi rasial di Australia adalah tahapan upaya penyelesaian atau konsiliasi. Dalam tahap ketiga ini Konsiliator akan mempertemukan korban dan pelaku untuk dapat bertatap muka, melakukan penyelesaian melalui pesan suara atau surat menyurat. Penyelesaian tersebut tentu ditempuh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui proses konsiliasi. Konsiliasi berarti bahwa AHRC akan berusaha membantu pengadu dan orang atau organisasi yang telah keluhkan serta mencoba menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Konsiliasi dapat terjadi dalam pertemuan tatap muka yang disebut 'konferensi konsiliasi' atau melalui konferensi telepon. Beberapa kasus, keluhan dapat diselesaikan melalui pertukaran surat atau dengan mengirimkan pesan melalui telepon atau email melalui Konsiliator. Jika konsiliasi diselesaikan dengan sebuah pertemuan, maka Konsiliator akan mengizinkan pihak pelapor dan yang ter laporkan untuk membawa satu rekan yang membantu mereka memberi solusi atau memberi dukungan moral. Konsiliator dapat dipegang oleh Kepala Komisi secara langsung, atau staff pembantu komisi. Konsiliasi dapat dilakukan di kantor AHRC, atau pada tempat yang telah disepakati oleh semua pihak.

Keluhan dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Misalnya dengan permintaan maaf, perubahan kebijakan atau kompensasi. Lama waktu dari diterimanya keluhan hingga penyelesaian oleh AHRC tergantung pada tahap ketiga ini. Berikut ini pemaparan presentase lama waktu penindakan keluhan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh AHRC :

Tabel 7
Presentase Lama Waktu Penindakan Keluhan Diskriminasi Rasial Dari Penerimaan Hingga Penyelesaian Oleh AHRC Tahun 2015-2018

No	Bulan	2015-2016	2016-2017	2017-2018
1.	0-3 Bulan	42%	45%	40%
2.	3-6 Bulan	78%	71%	74%
3.	6-9 Bulan	93%	83%	92%
4.	9-12 Bulan	98%	94%	96%
Total Keluhan		429 Keluhan	409 Keluhan	290 Keluhan

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, "2017-2018 Complaint Statistics", https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202017-2018.pdf, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, hal 01.

Berdasarkan pemaparan di tabel 7, dapat dilihat bahwa lama proses keluhan tersebut diterima hingga diselesaikan rata-rata memakan waktu 6-12 bulan. Memang dalam rentan waktu 3-6 bulan pertama sudah banyak keluhan yang sudah dapat diselesaikan perkaranya oleh AHRC. Akan tetapi persentase penyelesaiannya masih berada di kisaran 75%. Sedangkan dari tahun 2015-2018 AHRC hampir menyelesaikan keluhan yang diterima dengan persentase 98% keluhan diselesaikan pada tahun 2015-2016, 94% keluhan diselesaikan pada tahun 2016-2017 dan 96% keluhan diselesaikan pada tahun 2017-2018.

Tentu hal ini merupakan angka yang positif bagi AHRC dalam hasil akhir kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun.

Sebagai contoh kasus yang dialami dua pekerja dengan latar belakang etnis Nigeria. Mereka membuat keluhan kepada AHRC di bawah RDA yang menceritakan *supervisor* perusahaan tempat mereka bekerja telah bersikap rasial dengan membawa etnis asal mereka yaitu Nigeria. Konsiliator menerima keluhan tersebut dan meminta detail informasi perusahaan kepada pelapor. Konsiliator kemudian melakukan investigasi dan mengarahkan semua pihak untuk menyelesaikannya dengan konsiliasi. Konsiliasi berhasil tercapai dengan beberapa kesepakatan antara lain, perusahaan membuat surat permohonan maaf secara tertulis kepada pelapor, perusahaan memberikan kompensasi uang sejumlah 17.550 dollar kepada setiap pelapor, perusahaan menerapkan peraturan anti diskriminasi di perusahaan tersebut, perusahaan akan menyediakan pelatihan anti diskriminasi kepada seluruh pekerja dan membawa *supervisor* perusahaan tersebut untuk mengikuti bimbingan konseling dari AHRC. (AHRC, “Freedom from Discrimination : National Consultation Report 2015”, Sydney : AHRC, hal 24.)

Upaya Penerusan Tindakan Hukum atau Pelanjutan Peradilan

Berikutnya setelah upaya konsiliasi adalah upaya proses penerusan tindakan hukum atau lanjutan ke pengadilan oleh AHRC. Pada tahap ini AHRC tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau tindakan hukum jika proses konsiliasi pada tahap ketiga mengalami kegagalan. AHRC hanya akan memberikan saran kepada korban untuk meneruskan kasus yang telah dikeluhkan kepada *Federal Court* Australia. Hal ini dikarenakan tindakan dan penjatuhan sanksi hanya berhak dilakukan oleh FDA tersebut. Aturan dan prosedur keempat ini juga merupakan adopsi dari aturan dan prosedur UNHRC nomor lima yaitu tentang rekomendasi umum.

Pada tahap upaya ini AHRC tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah diskriminasi rasial yang telah dikeluhkan tersebut melanggar hukum. Jika keluhan yang diajukan oleh korban tidak diselesaikan atau dihentikan karena alasan lain, pengadu atau korban dapat membawa masalah tersebut ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan dapat memutuskan apakah diskriminasi rasial yang telah terjadi melanggar hukum. Sebagai korban, nantinya hanya memiliki waktu selama 60 hari semenjak AHRC menyelesaikan keluhan untuk mengajukan aplikasi ke Pengadilan Federal Australia atau Pengadilan Sirkuit Federal.

Lalu dalam keadaan tertentu, korban atau pengadu hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan jika pengadilan telah memberikan izin kepada korban untuk melakukannya. Komisi tidak dapat membawa masalah ini ke pengadilan untuk pengadu atau membantu korban mengajukan kasus yang telah terjadi di pengadilan. Jika sudah ditahap ini, korban atau pengadu mungkin perlu berbicara dengan pengacara atau layanan hukum jika ingin pergi ke pengadilan dalam menyelesaikan masalah diskriminasi rasial yang telah dialaminya. AHRC bukan tidak ingin membantu ataupun lepas tangan dalam hal ini. Akan tetapi langkah ini sudah diatur dalam dasar berdirinya AHRC terkait peran, fungsi dan kedudukannya dalam menangani permasalahan diskriminasi rasial.

Sepanjang tahun 2015-2016 AHRC berhasil menyelesaikan keluhan sampai pada tahap yang beragam dengan total keluhan masuk sebanyak 396 keluhan. Sebanyak 70% atau 268 keluhan telah berhasil diselesaikan dengan cara berdamai. Lalu sebanyak 8% atau 29 keluhan dihentikan, sebanyak 13% atau 55 keluhan diakhiri dengan alasan tidak dapat mencapai konsiliasi, 8% atau 29 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian dan sebanyak 1% atau 15 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu. Dari hasil pengaduan keluhan yang diselesaikan oleh AHRC terdapat sejumlah keluhan yang dilanjutkan kedalam tahap pengadilan karena sudah tidak memungkinkan mencapai tahap konsiliasi dan dihentikan kasusnya oleh AHRC dengan jumlah 63 keluhan.

Lalu, sepanjang tahun 2016-2017 AHRC berhasil melakukan finalisasi penyelesaian keluhan sampai pada tahap yang beragam dengan total keluhan masuk sebanyak 474 keluhan. Sebanyak 50% atau 237 keluhan telah berhasil diselesaikan dengan cara berdamai. Lalu sebanyak 20% atau 94 keluhan dihentikan, sebanyak 10% atau 47 keluhan diakhiri dengan alasan tidak dapat mencapai konsiliasi, 6% atau 28 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian dan sebanyak 14% atau 66 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu. Dari hasil pengaduan keluhan yang diselesaikan oleh AHRC terdapat sejumlah keluhan yang dilanjutkan kedalam tahap pengadilan karena sudah tidak memungkinkan mencapai tahap konsiliasi dan dihentikan kasusnya oleh AHRC dengan jumlah 66 keluhan.

Sedangkan pada tahun 2017-2018 AHRC berhasil menyelesaikan keluhan sampai pada tahap yang beragam dengan total keluhan masuk sebanyak 364 keluhan. Sebanyak 40% atau 145 keluhan telah berhasil diselesaikan dengan cara berdamai. Lalu sebanyak 22% atau 80 keluhan dihentikan, sebanyak 17% atau 61 keluhan diakhiri dengan alasan tidak dapat mencapai konsiliasi, 13% atau 47 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian dan sebanyak 7%

atau 25 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu. Dari hasil pengaduan keluhan yang diselesaikan oleh AHRC, terdapat sejumlah keluhan yang dilanjutkan kedalam tahap pengadilan karena sudah tidak memungkinkan mencapai tahap konsiliasi dan dihentikan kasusnya oleh AHRC.

Upaya Audiensi Publik atau Penyampaian Putusan AHRC

Tahap terakhir dari upaya AHRC dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia adalah melalui tahap audiensi publik. Dalam tahap paling akhir ini AHRC memberikan informasi kepada korban yang mengajukan kasus diskriminasi yang dialami kepada *Federal Court* Australia dan menunggu hasil akhir keputusan dari *Federal Court* Australia. Aturan dan prosedur terakhir AHRC ini merupakan adopsi dari aturan dan prosedur yang telah dilakukan oleh UNHRC dalam penanganan kasus internasional. Yakni aturan dan prosedur nomor enam tentang diskusi tematik serta konferensi.

Jika keluhan yang telah dilaporkan tidak terselesaikan atau dihentikan karena alasan tertentu, ketua komisi akan memutuskan apakah telah terjadi tindakan diskriminasi yang parah atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketua komisi dapat mengadakan audiensi publik di mana masing-masing pihak dapat menyatakan pendapat dan pandangan versi mereka tentang kejadian tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jika ketua komisi merasa yakin bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia, maka ketua komisi akan melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung Federal. Dalam laporan tersebut, ketua komisi dapat merekomendasikan kompensasi atas kerugian atau cedera yang dialami seseorang. Namun laporan tersebut harus diajukan didalam Parlemen. Contoh keputusan ketua komisi tentang hak asasi manusia dan diskriminasi tersedia disitus web resmi milik AHRC yakni pada (<http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act.>)



Gambar 3

Laporan Keputusan AHRC Terkait HAM dan Diskriminasi Rasial Di Australia

Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC), "Human Right Report",
<https://www.humanrights.gov.au/our-work/legal/projects/human-rights-reports>, diakses pada tanggal 20
Februari 2020.

Berdasarkan pemaparan gambar 3, lima tahapan upaya yang dilakukan oleh AHRC dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia tahun 2015-2018 memiliki hasil yang positif. Dari tahun ke tahun, jumlah keluhan yang diterima oleh AHRC terkait diskriminasi rasial menurun. Sedangkan kinerja AHRC dalam menyelesaikan keluhan diskriminasi rasial terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya keluhan yang berhasil mencapai titik berdamai dan mencapai konsiliasi. Lalu keluhan rasial yang tidak dapat ditangani secara hukum oleh AHRC pun juga langsung diserahkan kepada FCA (*Federal Court Australia*) untuk diadili. Kelima upaya penyelesaian keluhan diskriminasi ras yang diterapkan oleh AHRC merupakan aturan dan prosedur yang diadopsi dari UNHRC dengan penyesuaian oleh AHRC secara fungsi dan pelaksanaan.

Selama upaya penyelesaian kasus diskriminasi ras yang dilakukan oleh AHRC berlangsung, tentu tidak menutup kemungkinan jika terdapat kendala dan hambatan selama proses tersebut berjalan. Selama proses penyelesaian kasus diskriminasi ras tersebut berlangsung dapat bermunculan kendala dan hambatan dari berbagai aspek. Kendala atau hambatan yang muncul pertama kali adalah adanya anggapan dari masyarakat Australia sendiri bahwa Australia adalah negara yang rasis. (Australia Dinilai Makin Rasis, <https://news.detik.com/abc/-australia/d-3418779/australia-dinilai-makin-rasis>.) Meski ada peningkatan persepsi atas rasisme, kebanyakan warga Australia percaya, hubungan antara masyarakat Aborijin dan non-Aborijin begitu penting dan rekonsiliasi bisa dicapai. Survei ini menemukan, 93% dari masyarakat Aborijin dan 77% dari masyarakat umum berpikir bahwa budaya Aborijin dan penduduk Selat Torres begitu penting untuk identitas nasional Australia.

Mayoritas warga Australia juga memandang hubungan di antara keduanya penting. Meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dari survei pertama di tahun 2008. Jika demikian, masalah utama yang masih akan dihadapi oleh AHRC dalam mengurangi kasus

diskriminasi rasial di Australia adalah tentang bagaimana mengubah cara pandang, persepsi dan nilai-nilai keberagaman yang dipercayai oleh penduduk Australia terhadap keberagaman serta kemajemukan ras atau etnis di Australia.

Alur Mekanisme Prosedur AHRC Dalam Menangani Kasus Diskriminasi Ras di Australia



Gambar 4

Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, "AHRC Corporate Plan 17-18", <https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%20Corporate%20Plan%202017-18%20.pdf>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, hal 25.

Simpulan

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah terhadap diskriminasi ras dengan jumlah yang tinggi. Banyaknya diaspora dari beberapa etnis yang masuk ke Australia membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis yang cukup beragam. Akan tetapi fakta tersebut justru menimbulkan situasi yang berbeda-beda pada lingkungan dan situasi sosialisasi warga negaranya. Adanya kasus diskriminasi ras di Australia yang kian berkembang menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Australia sudah lepas dari bayang-bayang historis kolonialisasi. Walaupun Australia juga merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak Asasi manusia, akan tetapi Australia secara bersamaan dapat dikatakan sebagai negara dengan angka rasisme yang tinggi.

Australian Human Rights Commission (AHRC) yang didirikan pada pada tanggal 10 Desember 1986 hadir sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memerangi tingginya angka diskriminasi ras di Australia dan berusaha dengan keras menekan

kemunculan aksi rasial tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin berlakunya peraturan dan ketetapan mengenai kesamaan hak asasi manusia, sehingga hak-hak tersebut akan terus dihormati dan dihargai serta dijunjung tinggi keberadaannya di Australia tanpa pandang bulu. AHRC selama ini telah menangani banyak kasus kemanusiaan antara lain diskriminasi ras, kesetaraan gender, imigran dan pencari suaka, diskriminasi seksual, penyandang disabilitas, orientasi identitas seksual, perlindungan anak, dan hak kebebasan.

Adanya AHRC membuat masyarakat dengan mudah melaporkan kasus diskriminasi ras yang menimpa mereka. AHRC bertindak tidak hanya sebagai wadah penerima keluhan, namun juga sebagai badan yang bertanggung jawab melakukan proses konsiliasi hingga keluhan tersebut selesai dengan damai. Upaya pasti yang telah dilakukan oleh *Australian Human Rights Commission* (AHRC) dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia pada tahun 2015-2018 yaitu melalui pelaksanaan aturan dan prosedur sosialisasi atau peringatan awal, penampungan, penyelidikan, penyelesaian, penerusan tindakan hukum dan audiensi publik. Berdasarkan hasil penelitian diatas, keberadaan AHRC telah berhasil menekan dan menyelesaikan banyak keluhan terkait kasus diskriminasi ras di Australia pada tahun 2015-2018.

Menurut penulis rasisme menjadi masalah besar yang dihadapi tidak hanya oleh masyarakat Australia melainkan oleh masyarakat dunia saat ini. Rasisme sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Tindakan rasial yang dilakukan tak jarang berujung tindakan diskriminasi sosial, perbudakan, segregasi atau pembatasan, kekerasan rasial hingga genosida atau pemusnahan ras. Tindakan rasial memiliki beberapa alasan untuk tetap tumbuh subur hingga sekarang.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, pelajaran yang dapat diambil adalah konsistensi upaya Australia melalui AHRC dalam membela dan memperjuangkan hak-hak ras minoritas yang telah lama tertindas dan terpinggirkan serta upaya mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia yang dapat dilihat penurunannya dari 2015-2018. AHRC secara bertahap melakukan pendampingan dan membuat perubahan signifikan terhadap permasalahan-permasalahan rasial yang ada di Australia selama bertahun-tahun sejak era *White Australia Policy* dihapuskan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada harapan tinggi dari pemerintah Australia dan masyarakat Australia sekarang untuk menghapuskan sekat rasial yang sudah terbangun sejak masa awal pendudukan. Keinginan untuk berbagi peran dan tempat yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat AHRC menjadi lembaga yang diharapkan mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan masa depan kemajemukan Australia.

Daftar Pustaka

Buku:

- AHRC, *Racial Discrimination Know Your Rights*, AHRC Licence, Sydney, 2014.
- Commonwealth of Australia, “As a matter of fact: Answering the Myths and Misconceptions About Indigenous Australians”, ATSIC, Canberra, 1998.
- D. Milnes, Peter, “From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia”, Belco Consulting, Perth, Australia, 2005.
- E. Levey, Geoffrey Brahm, *Political Theory and Australian Multiculturalism*, Berghahn Books, New York, 2008.
- F. Pudjiarto, Harum, *Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- G. Tsutsui, Kiyoteru dkk, *Global Civil Society and the International Human Rights Movement: Citizen Participation in Human Rights International Nongovernmental Organization*, Oxford University Press, New York, 2004.

Jurnal dan Buletin:

- Australian Human Rights Commission (AHRC)*, Racism. It Stops With Me: Community Service Announcements 2017, Sydney, AHRC Fact Sheet, 2017.
- Carlina, Riani, *Combating Cyber Racism: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016*, Journal of International Relations UNDIP, Semarang, 2017, hal 44.
- Irving, Heleng, *Five Things to Know About the Australian Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004..

Website:

- Anonim, “Australian Human Rights Commission Act 1986 No.125”, <https://www.legislation.gov.au/Details/c2019c00030/964a5f12-457c-48e3-85c0-5e92577431fb>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.
- Anonim, “Ratification Status for Australia”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=9&Lang=EN, diakses pada tanggal 30 Juni 2019.
- Australian Human Rights Commission (AHRC)*, “Anti Racism in 2018 and Beyond”, https://www.humanrightss.gov.au/sites/default/files/document/publication/NARPS_2018_FINAL-WEB-VERSION.PDF , diakses pada tanggal 24 Februari 2019.
- Australian Human Rights Commission (AHRC)*, “Complaints Under Racial Discrimination ACT”, <https://www.humanrightss.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-under-racial-discrimination-act>, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

Australian Human Rights Commission (AHRC), “Racism It Stops With Me Community Service Announcements 2017”, https://www.humnrightss.gov.au/sites/default/files/document/publication/AHRC_RISWM_2017_CSA_Factsheet.docx, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

Australian Human Rights Commission (AHRC), “Freedom from Discrimination: Report on the 40th anniversary of the Racial Discrimination ACT, National Consultation Report 2015”, https://www.humanrightss.gov.au/sites/default/files/document/publication/RDA40_report_2015_AHRC.pdf, diakses pada tanggal 09 Februari 2019

Australian Human Rights Commission (AHRC), “Commission General Publications”, <https://www.humanrights.gov.au/our-work/commission-general/publications/annual-report-2017-2018>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

Australian Human Rights Commission (AHRC), “History of the Commission”, <https://www.humanrights.gov.au/about/what-are-human-rights/history-commission>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020.

Australian Human Rights Commission (AHRC), “Indonesian Languages-AHRC Making Complaint“, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/languages/IND_AHRC_Making_a_complaint.pdf, diakses pada tanggal 02 Februari 2020.

Australian Human Rights Commission (AHRC), “Race Discrimination”, <https://www.humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Australian Human Rights Commission (AHRC), “Human Right Report”, <https://www.humanrights.gov.au/our-work/legal/projects/human-rights-reports>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Channel News Asia, “Australian PM to 'Sweat Blood' for Aboriginal Recognition”, <http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/australian-pm-tosweat/1526628.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

Closer Look: The Australian Constitution, “The Parliamentary Education Office”, <http://www.peo.gov.au>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

Dudgeon, Pat dkk, “Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians”, <http://www.peo.gov.au>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020.

Lampiran 1:

**Alur Mekanisme Prosedur AHRC Dalam Menangani
Kasus Diskriminasi Ras di Australia**



Sumber: *Australian Human Rights Commission (AHRC)*, "AHRC Corporate Plan 17-18", <https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%20Corporate%20Plan%202017-18%20.pdf>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, hal 25.